Pengaturan Hak Politik Calon Bupati & Wakil Bupati Setelah Putusan MK No: 42/PUU-XIII/2015

Herman

Manajemen Informatika,
STMIK Handayani, Makassar, 90232,
Herman_ph@yahoo.co.id

Andi Firmansyah

Manajemen,
STIE AMKOP, Makassar, 90231,
andifirman23.af@gmail.com

Abstrak— Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat pembatasan hak politik bagi mantan narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Masalah pokok tersebut selanjutnya dirinci menjadi dua sub masalah, yaitu: (1) Bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan narapidana? Narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 42/PUU-XIII/2015 dan apa dasar pertimbangannya?, (2) Apa syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana untuk menjadi calon kepala daerah menurut Mahkamah Konstitusi? Putusan No.: 42/PUU-XIII 2015? Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam tinjauan ini, lebih spesifiknya: mengatur eksplorasi yang sah. Mata air kebendaan yang sah dalam penelitian ini merupakan sumber kebendaan yang hakiki, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah: buku, artikel dan jurnal. Pendekatan hukum (*statutory approach*) digunakan sebagai pendekatan. Selain itu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan menarik kesimpulan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan MK No.:42/PUU-XIII/2015 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dijelaskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dasar pemeriksaan adalah hak konstitusional setiap orang, termasuk mantan narapidana, untuk menggunakan hak politiknya untuk dipilih sederajat dengan calon kepala daerah lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana yang berpeluang menjadi kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 diisolasi menjadi empat wilayah, antara lain: (1) tidak sah untuk memilih jabatan publik; (2) substansial untuk waktu yang dibatasi hanya 5 (lima) tahun setelah terpidana melakukan hukumannya; (3) Pengecualian dilakukan terhadap mantan narapidana yang secara terbuka dan sungguh-sungguh menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana; (4) bukan sebagai pelaku kebiasaan.

Kata Kunci— Hak Politik, Bupati, Putusan Mahkamah Konstitusi, Statutory Approach

I. PENDAHULUAN

Esensi dari pada pemerintahan syari'ah, adalah memilih pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya agar terbentuk negara yang baldatun toyibatun. Oleh karena mencari pemimpin yang dapat mengayomi hanyalah bisa dinilai melalui pengamatan orang banyak, maka kemudian dibuka saluran dari orang banyak itu untuk menentukan pemimpinnya dalam suatu konsensus bersama.

Dengan tidak dibenarkannya seorang mendaulat dirinya langsung menjadi pemimpin, maka pada konteks demikian pandangan Islam tidak sejalan dengan sistem pemerintahan yang oligarki. Hanyalah dengan jalan suara mayoritas, melalui pengumpulan suara yang sejalan dengan pola musyawarah, seorang kemudian menjadi pemimpin atas kehendak orang lain, bukan lagi atas kehendak dirinya.

Sesungguhnya kekuasaan yang ada di tangan kepala negara dan segala kekuasaan pemerintahan itu adalah amanat. Maka harus keluar dari beban amanat ini dengan menggunakannya dalam hal-hal yang diridhoi Allah. Allah akan meridhoinya jika posisi negara diberikan kepada individu yang ideal sesuai aturan syariat dan tidak menunjuk ke anggota keluarga terdekat dan menjadi individu yang terpuji dan pantas, karena tindakan ini adalah pengkhianatan dan menghapus perintah.

Spirit dari pada filosofi disiplin, selain sebagai penghalang, juga melakukan pemulihan sosial dan upaya reintegrasi. Pada akhirnya juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor: 42/PUU-XIII/2015, sehingga pembatasan hak untuk dipilih bagi mantan narapidana yang telah divonis inkra dari ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya melalui Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah melahirkan norma baru yang bersendikan pada moral publik dan menempatkan hak rakyat pemilih dalam tahtanya, berhak pula untuk mengenal identitas dari Calon Kepala Daerah yang akan dipilihnya. Maka dari itu, penelitian ini selanjutnya

difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: pembatasan kebebasan politik mantan narapidana untuk melamar sebagai Calon Kepala Daerah dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sebagai syarat administratif agar dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: penelitian hukum normatif. Merupakan kajian tentang ketentuan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015.

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Apa yang akan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data termasuk buku dan undang-undang dan peraturan terkait Politik Dinasti dan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh informasi dan data dalam menyusun skripsi ini, sebenarnya pemeriksaan ini tidak terletak pada suatu wilayah tertentu, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dalam kaitannya dengan penyelidikan yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Politik Dinasti dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, dalam siklus penelitian, postulat ini sebagian besar diselesaikan di perpustakaan dan percakapan dengan para ahli tentang regulasi yang dilindungi, skolastik yang sah, saksi mata politik, dan spesialis kebebasan dasar.

B. *Metode Pendekatan*

Pendekatan hukum, yaitu pendekatan status, digunakan sebagai metode pendekatan. Pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji putusan uji materi Pasal 7(r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembatasan Keluarga Besar untuk menjadi calon kepala daerah yang ingin menguasai urusan pemerintahan dinasti. Metodologi pengaturan ini adalah untuk menggambarkan dan membedah standar baru yang dianggap ilegal dalam pasal-pasal UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Jenis eksplorasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah: mengatur eksplorasi yang sah. Hal ini merupakan kajian terhadap pengaturan Pasal 7(r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembatasan Jabatan Keluarga Untuk Promosi Calon Kepala Daerah.

C. *Sumber Data*

Data merupakan catatan dari bermacam-macam realitas. Tanggal adalah jenis jamak dari tanggal, didapat dari bahasa Latin, dan itu menyiratkan sesuatu yang diberikan. Dalam sains (logis) realitas dikumpulkan menjadi data. Data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dinyatakan secara jelas dan ringkas sehingga dapat dipahami oleh orang lain

yang belum mengalaminya secara langsung, hal ini dikenal dengan istilah deskripsi.

1. *Data primer*

Data primer adalah data yang berasal dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan pengangkatan kepala daerah, seperti: UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. *Data sekunder*

Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung data primer yang berasal dari berbagai literatur yang relevan seperti: Mis.: buku, jurnal, makalah akademis, surat kabar dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3. *Data tersier*

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain..

D. *Metode Pengumpulan Data*

Sehubungan dengan pendekatan penelitian di atas, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, hasil penelitian, laporan, terkait dengan Pengaturan Politik Dinasti dan Hak Asasi Manusia.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan untuk mengarsipkan hasil dari penyelidikan informasi penting dan opsional yang baru-baru ini disusun di atas kertas;
2. Software untuk menyimpan bahan-bahan legal, misalnya, laptop dan blaze drive untuk menyimpan informasi penting dan tambahan yang dikumpulkan baik secara fisik maupun di web.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan petunjuk langkah demi langkah untuk memperjelas, menggambarkan dan menggambarkan masalah dan jawaban mereka terkait dengan komposisi ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Berdasarkan Putusan MK NOMOR: 42/PUU-XIII/2015*

Perkembangan ketatanegaraan modern, tentunya tidak dapat dilepaskan dari sosio-historis ketatanegaraan Islam (Al-siyasiin). Hukum tata negara yang menyoroti pengisian jabatan pemimpin (pemerintahan) saat ini, juga memperhatikan landasan filosofis pembedaan, yang bertujuan untuk memulihkan pelaku kejahatan menjadi manusia yang lebih bermartabat, pengayom antar sesama, dan diterima di lingkungan sosialnya. Dewasa ini, dapat dikatakan bahwa dispensasi bagi mantan narapidana dibolehkan untuk menjadi pemimpin yang melalui sarana pencalonan Kepala Daerah, hanyalah pengembangan dari nilai-nilai Islam yang sudah pernah dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW.

Putusan MK Nomor: 42/PUU-XIII/2015 merupakan absorpsi dari nilai-nilai kepemimpinan yang memberikan pintu maaf kepada mantan Narapidana, untuk membuktikan integritasnya, sebagai insan mulia dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk orang-orang yang dipimpinnya.

Setelah di atas diuraikan hak politik yang berdimensi hak untuk dipilih sebagaimana yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidaklah berarti bahwa hak itu dengan sebebas-bebasnya orang dapat menggunakannya. Akan tetapi hak tersebut terbatas oleh hak-hak orang lain.

B. *Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana*

Pada bagian berikut ini, searah dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, yaitu pembatasan hak istimewa politik bagi mantan narapidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 dan pasal 2 huruf K dilarang keras. Tentunya, pijakan hakim dimulai terlebih dahulu dalam pertimbangan hukumnya.

Kendatipun kemudian Dalam putusan MK nomor: 42/PUU-XIII/2015 terdapat perbedaan pendapat antara dua hakim konstitusi, yaitu Maria Farida Indrati dan I Dewa Gede Palguna, oleh karena pengajuan permohonan yang demikian sudah pernah diputus oleh MK, dalam putusan MK Nomor: 14-17/PUU-V/2007, sehingganya permohonan tersebut seharusnya ditolak. Akan tetapi dari pendapatnya, kedua-duanya juga sepakat kalau pembatasan hak politik bagi mantan narapidana dalam jabatan publik yang melalui pemilihan adalah inkonstitusional bersyarat.

C. *Syarat Konstitusional Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana Putusan MK NO:42/PUU-XIII/2015*

Mantan narapidana memiliki hak untuk dipilih secara bersyarat. Dikatakan bersyarat, sebab ia hanya dapat menggunakan haknya tersebut, hak yang sifatnya

pasif kalau mengikuti syarat konstitusional yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mantan narapidana dari kedua putusan tersebut, hingga pada Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada hakikatnya memiliki syarat pengaturan yang sama, yaitu:

1. Tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk memilih posisi publik;
2. Sah untuk waktu yang dibatasi 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai melaksanakan hukumannya;
3. Kasus khusus dibuat untuk narapidana sebelumnya yang secara transparan dan benar mengumumkan kepada publik bahwa mereka adalah narapidana sebelumnya;
4. Bukan sebagai pelaku kebiasaan.

Pada dasarnya syarat pembatasan ini, sebagai pengecualian tidak dapatnya dibatasi hak untuk dipilih bagi mantan narapidana, menimbulkan juga tafsir lain kalau masih ada jabatan publik lainnya, yang tidak melalui pemilihan dapat saja dibatasi haknya untuk menempati suatu jabatan Pemerintahan, sebab pernah divonis oleh Pengadilan inkra dalam ancaman pidana 5 (lima) tahun.

IV. KESIMPULAN

Pembatasan kebebasan berpolitik bagi mantan narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 42/PUU-XIII/2015 dan apa yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu: dalam ketentuannya pada Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 juncto ayat 2 huruf k telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, jadi pengaturan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan bersifat membatasi lagi. Sedangkan dasar pertimbangan mahkamah menyatakan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana inkonstitusional bersyarat, yaitu berdasarkan pada hak konstitusional setiap orang, termasuk bagi mantan narapidana untuk menggunakan hak politiknya untuk dipilih secara sama dengan Calon Kepala Daerah lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana menjadi Calon Kepala Daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:42/PUU-XIII/2015 dipecah menjadi empat, antara lain: Tidak substansial untuk jabatan publik yang dipilih; sah untuk waktu yang dibatasi 5 (lima) tahun setelah terpidana melaksanakan pidananya; Pengecualian berlaku bagi mantan narapidana yang secara lugas dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana; Bukan sebagai pelaku yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Anis, Muhammad. *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Mizan, 2013.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata

- Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Asshiddiqie, Jimmly. Islam Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Gema Insan Pers, 1995.
- Averroes Al-Khawarizmi, Damang, "Selamat Datang Pilkada Serentak", Blog Negara Hukum. <http://www.negarahukum.com/hukum/selamat-datang-pilkada-serentak-2015.html>. (25 April 2016).
- Basyir, Ahmad Azhar. Negara dan Pemerintahan dalam Islam. Yogyakarta: UII Press, 1988.
- Cassie, Antonio Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Damang dan Nursal Ns. Carut Marut Pilkada Serentak 2015, Sebuah Tinjauan Hukum. Makassar: Philosophia Press, 2016.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Perppu Nomor 1 Tahun 2015", official website DPR RI. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf> (25 April 2016).
- Effendi, Masyhur Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Gunakarya, Widia. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: Armico, 1988.
- Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Hiariej, Eddy OS. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Haekal, Muhammad Husain. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.
- Halim, Abdul. Politik Lokal. Yogyakarta: LP2B, 2014.